



**PERILAKU PENERIMA PROGRAM BANTUAN PKH BIDANG PENDIDIKAN
DALAM MENGINTERPRETASI BANTUAN PEMERINTAH DI MASA
PANDEMI COVID-19
(STUDI : DI DESA GEDAMBAAN, KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM)**

Klarisha Viona Amanda¹, Khairussalam²,

¹ Sosiologi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Lambung
Mangkurat, Indonesia, klarishaviona18@gmail.com

² Sosiologi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Lambung
Mangkurat, Indonesia klarishaviona18@gmail.com, khairsalam07@gmail.com

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemerintah yang berupaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin, bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan nasional. Penelitian ini mengkaji mengenai perilaku KPM PKH dalam memanfaatkan dana bantuan PKH pada komponen pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku KPM dalam pemanfaatan dana bantuan PKH pada komponen pendidikan serta mengetahui bagaimana peran dan upaya pendamping PKH dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak putus sekolah di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini yaitu: Kepala Desa, Pendamping PKH, dan KPM. Teori yang digunakan dari penelitian ini adalah Teori Fungsional AGIL Talcot Parsons dan Teori Tindakan Sosial Max Weber. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka didapatkan hasil: *Pertama*, KPM di Desa Gedambaan menyalahgunakan dana bantuan PKH pada komponen pendidikan, pada masa pandemi covid-19 anak dari KPM tersebut tidak mengikuti



pelajaran selama sekolah online alhasil selama masa pandemi anak dari KPM tersebut bekerja untuk membantu kehidupan keluarga, dan KPM tersebut menyalahgunakan dana bantuan pendidikan untuk memenuhi kehidupan keluarga. *Kedua*, kendala yang dihadapi pendamping PKH adalah anak dari KPM tidak melanjutkan sekolah dikarenakan dampak dari sekolah online, upaya yang dilakukan pendamping dalam mengatasi hal tersebut dilakukannya home visit agar anak KPM tersebut mau melanjutkan sekolah, pendamping memberikan pemahaman sebagai edukasi kepada KPM akan pentingnya pendidikan pada anak

Kata Kunci: Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Peran Pendamping, dan Komponen Pendidikan

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a government program that seeks to provide social protection for poor families, aiming to overcome the problem of national poverty. This thesis discusses the behavior of PKH KPM in utilizing PKH aid funds in the education component. This study aims to determine how the behavior of KPM in the use of PKH aid funds in the education component and to find out how the role and efforts of PKH companions in overcoming problems that occur in school dropouts in Gedambaan Village, Pulau Laut Sigam District, Kotabaru Regency. This research uses descriptive qualitative research method. To obtain data, researchers collected data through observation, interviews, and documentation. The informants of this research are: Village Head, PKH Facilitator, and KPM. The theory used in this research is Talcot Parsons' AGIL Functional Theory and Max Weber's Social Action Theory. From the results of research conducted by researchers, the following results were obtained: First, KPM in Gedambaan Village misused PKH assistance funds for the education component, during the covid-19 pandemic the children from KPM did not take lessons during online school as a result during the pandemic the children from KPM worked to support family life, and the KPM



misappropriated education assistance funds to meet family needs. Second, the obstacle faced by PKH facilitators is that children from KPM do not continue school due to the impact of online schools, the efforts made by the facilitators in overcoming this are carried out home visits so that the KPM children want to continue school, the assistants provide understanding as education to KPM about the importance of education in child

Keywords: Beneficiary Families (KPM), Expected Family Program (PKH), Facilitator Role, and Educational Component

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan intens dan diperlukannya upaya dari pemerintah mengatasi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan sehingga berdampak buruk dalam pemenuhan standar kebutuhan hidup (Djabar, Olilingo, & Santoso, 2022). Program pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini masih terus gencar dilakukan, berbagai macam program pemberdayaan dilaksanakan, hal ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik (Suleman & Resnawaty, 2017). Sering kali dilakukan studi mengenai permasalahan tentang kemiskinan, tetapi dari studi yang dilakukan tersebut jawaban-jawaban atas permasalahan kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan sulit diberantas. Untuk dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan ini, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan nasional.



Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk program perlindungan sosial yang ada di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial (bansos). Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Tanpa perhatian khusus pemerintah, anak putus sekolah rentan menjadi korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan mereka juga rentan terhadap pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang sampai dengan kriminalitas. Putus sekolah juga berdampak pada minimnya wawasan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak, masa depan anak yang tidak jelas, dan juga dapat menyebabkan banyaknya pengangguran di masa yang akan datang. Program PKH dalam komponen pendidikan ini memberikan bantuan dana untuk meringankan beban RSTM dalam menyekolahkan anak-anaknya, dana tersebut digunakan oleh RSTM untuk membeli perlengkapan sekolah anak-anaknya, seperti: Pakaian, LKS, dan buku tulis yang diperlukan sehingga bisa menunjang minat anak-anak untuk sekolah (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014).

Menurut pendamping PKH yakni ibu Maya Krida Astuti mengatakan bahwasannya, bantuan pemerintah dari adanya program PKH ini di Kecamatan Pulau Laut Sigam, masih ada KPM PKH dalam komponen pendidikan anak dari KPM PKH ini tidak melanjutkan sekolah. Seharusnya dari adanya program bantuan PKH ini para KPM PKH ini memenuhi kewajiban sebagai KPM PKH sebagaimana program tersebut berjalan. Permasalahan yang terjadi dilapangan, di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam yang mana anak dari KPM



PKH tersebut tidak melanjutkan sekolah dikarenakan faktor perekonomian keluarga dan dampak dari adanya sekolah online (Daring). Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah Bagaimana perilaku KPM PKH di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam dalam memanfaatkan dana bantuan PKH pada komponen pendidikan serta Bagaimana peran dan upaya pendamping PKH dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak putus sekolah di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam?

Tinjauan Pustaka

PKH dalam jangka pendek diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Sedangkan PKH untuk jangka panjang, diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan pendidikan. KPM PKH diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas, dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dan dapat mensejahterakan masyarakat. PKH merupakan sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (*social assistance*) yang merupakan jaminan sosial (*social security*) dalam bentuk tunjangan uang, barang, pelayanan kesejahteraan yang ditujukan kepada keluarga miskin yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Gultom, Kindangen, & Kawung, 2020). PKH berupaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan nasional.

Dalam penelitian ini teori Fungsionalisme Struktural AGIL dari Talcott Parsons dan teori Tindakan Sosial dari Max Weber yang bersifat subjektif karena merupakan hasil interpretasi terhadap kebenaran atau realita dari sudut pandang pembicara, dan fenomena yang terjadi. Penelitian ini memberi edukasi, pengetahuan, serta informasi mengenai bantuan sosial



pemerintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH), dengan salah satunya membahas mengenai perilaku KPM PKH dan peranan pendamping sosial.

B. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Metode deskriptif ini menyampaikan sebuah data–data dan fakta dengan cara menggambarkan secara detail tentang fenomena atau realita yang terjadi dilapangan pada saat penelitian (Sugiyono, 2018). Lokasi penelitian di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru yang mana desa tersebut termasuk dalam daftar desa penerima manfaat pada program PKH yang ada di Kabupaten Kotabaru. Di Desa Gedambaan ini ada KPM yang tidak memenuhi syarat program PKH dalam komponen pendidikan, yang mana anak dari KPM PKH tersebut putus sekolah, dan bantuan PKH pendidikan untuk anak tersebut disalahgunakan KPM untuk keperluan sehari–hari keluarga. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah: (1) Perilaku KPM PKH dalam memanfaatkan dana bantuan pendidikan di Desa Gedambaan; (2) Peran dan upaya pendamping dalam mengatasi permasalahan anak KPM PKH yang putus sekolah di Desa Gedambaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis dari *Miles* dan *Huberman* dalam Sugiyono (2011, hal.247) ada beberapa tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



C. PERILAKU PENERIMA PROGRAM BANTUAN PKH DALAM MEMANFAATKAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN DI DESA GEDAMBAAN, KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM

Program Keluarga harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin, selama Rumah Tangga Keluarga tersebut memenuhi kewajibannya dan untuk meningkatkan akses anak-anak usia sekolah khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap pendidikan dasar (SD & SLTP) dalam meningkatkan status pendidikan dasar anak (Tlonaen, Hardianto, & Diahloka, 2014).

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ratna dan Ibu Jamuriyah yang mana anak mereka mendapatkan bantuan pendidikan pada program PKH beliau menjelaskan bahwasannya dengan adanya PKH ini dapat membantu beban pengeluaran khususnya dapat membantu anak dari keluarga tidak mampu bisa melanjutkan sekolah.

Pada program PKH di Desa Gedambaan itu sendiri dapat membantu mengurangi beban pengeluaran dan membantu KPM untuk mengakses layanan PKH baik itu layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tetapi, KPM PKH dalam komponen pendidikan di Desa Gedambaan ini masih tidak tepat sasaran, dikarenakan KPM tersebut menyalahgunakan dana bantuan pendidikan. Dana bantuan PKH dalam komponen pendidikan tersebut yang mana ditujukan untuk anak sekolah, membeli perlengkapan dan keperluan untuk sekolah anak tetapi disalahgunakan KPM tersebut untuk keperluan dan kebutuhan keluarga.

1. Pelaksanaan Program PKH di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam

Sebagai salah satu program pengetasan kemiskinan oleh Kementrian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang baik



dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan program PKH, tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas dan detail. Adapun tujuan dari pelaksanaan PKH yaitu sesuai yang tercantum dalam Pedum PKH (2008, hal.12) yaitu:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RSTM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RSTM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, nifas, dan anak usia dibawah 6 tahun dari RSTM;
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang menjadi penentu pelaksanaan PKH di Kecamatan Pulau Laut Sigam salah satunya yaitu adanya langkah-langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Proses pelaksanaan PKH meliputi persiapan pelaksanaan mulai dari pemilihan kabupaten/kota oleh BPS (Badan Pusat Statistik), penentuan lokasi, penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta PKH.

Berkaitan dengan pelaksanaan program PKH di Desa Gedambaan ini berawal dari ketua RT setempat melakukan pendataan kepada orang-orang yang dilihat tidak mampu sambil mencocokkan juga data dari pusat, lalu ketua RT mengumpulkan nama-namanya, setelah itu data yang dari desa ini diserahkan ke Dinas Sosial, lalu dinas Sosial menyerahkan data tersebut ke Pusat. Selanjutnya setelah dari data pusat tersebut diverifikasi dan divalidasi lalu ditetapkanlah nama-nama penerima bantuan PKH.

2. Peran Pemerintah Desa terhadap Program PKH di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam

Pemerintah desa juga ikut berperan dalam mensejahterakan keadaan sosial masyarakat desa, pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana kondisi



masyarakat desa terutama dalam hal kemiskinan. Dengan adanya program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yakni Program Keluarga Harapan (PKH), dapat membantu mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintahan yang ada di desa ini sangat penting karena dari pihak pemerintah desa ini dapat membantu proses pendataan untuk KPM PKH yang ada di desa dan juga pemerintah desa ini melakukan pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi KPM PKH yang ada di desa tersebut. Pemerintah desa memiliki peran untuk mengumpulkan data-data, survey kerumah-rumah warga desa dibantu juga oleh ketua RT setempat setelah data-data dan survey tersebut dilakukan setelah itu diadakan musyawarah desa mengenai PKH. Setelah diadakannya musyawarah tersebut barulah data-data dari desa diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten, lalu Dinas Sosial menyerahkan data tersebut ke pusat. Setelah semua data valid lalu data tersebut di verifikasi, dari data yang sudah di verifikasi tersebut masuk ke dalam data induk atau DTKS.

3. Sasaran PKH

Sasaran program PKH ini diperuntukan untuk keluarga miskin yang mana didalamnya ada ibu hamil/menyusui, anak usia 0 sampai 6 tahun, anak sekolah usia 6 sampai 21 tahun, dan lanjut usia (lansia) diatas 70 tahun yang mana KPM PKH tersebut dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dari adanya akses layanan atau fasilitas tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran dan juga dapat menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM PKH dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut sesuai yang tercantum dalam Pedum PKH (2021, hal.22) yaitu:

1. Komponen Kesehatan



Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

- Ibu hamil/nifas/menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

- Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0–6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan adalah sebagai berikut:

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seseorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- Lanjut Usia (Lansia)

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama dan berada dalam keluarga.

- Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasiannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya bergantung dengan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama dan berada dalam keluarga.



4. Persepsi Masyarakat terhadap adanya Program Keluarga Harapan di Desa Gedambaan

Masyarakat Desa Gedambaan sangat merespon baik dengan adanya program bantuan sosial PKH dari pemerintah ini. Menurut penjelasan dari KPM PKH masyarakat sangat terbantu dengan program tersebut karena dapat meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran; dan dapat membantu perekonomian keluarga.

5. Perilaku KPM PKH di Desa Gedambaan

PKH melaksanakan misi pemberdayaan yang dirancang untuk memperkuat KPM **agar** mampu keluar dari kemiskinan melalui promosi kesehatan dan mendorong anak bersekolah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah dipilihnya ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak KPM sebagai penerima bantuan. Memperhatikan peran penting penerima bantuan dalam memperbaiki kualitas pendidikan khususnya pada anak-anak, tentu menjadi menarik ketika ditemukan fenomena anak-anak KPM yang tidak mau melanjutkan sekolah (Kustanto, 2019).

Berdasarkan temuan lapangan pada saat penelitian di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam peneliti menemukan permasalahan yang mana anak dari KPM PKH tidak lagi melanjutkan sekolah karena dampak pandemi covid-19 dan selama sekolah diadakan *daring* (online) anak KPM PKH tersebut tetap tidak sekolah, anak KPM PKH tersebut disuruh bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dan dana bantuan PKH yang dalam komponen pendidikan yang sudah dicairkan disalahgunakan oleh KPM untuk keperluan dan kebutuhan keluarga bukan digunakan untuk keperluan sekolah anak. Dampak positif nya dana bantuan PKH yang cair dapat membantu untuk mengurangi beban keuangan pada keluarga, serta KPM PKH dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dampak negatif



yang terjadi dari pernyataan diatas adalah: 1). Narasumber KPM PKH tersebut dana yang masuk disalahgunakan untuk membeli hal-hal yang lain karena anak yang sudah terdaftar dalam bantuan PKH tersebut tidak sekolah jadi dana yang masuk di gunakan untuk keperluan sehari-hari; 2). Dampak negatif pada anak yang tidak melanjutkan sekolah bisa mengakibatkan wawasan atau pengetahuan pada anak rendah.

6. Komponen Pendidikan PKH

Kriteria komponen pendidikan dalam program PKH, meliputi :

- a). Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat;
- b). Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
- c). Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat;
- d). Anak usia sekolah umur 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun (Norliani, Jamaludin, & Hayati, 2020).

Pada komponen pendidikan anak usia sekolah wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif. Bantuan sosial PKH untuk anak Sekolah Dasar (SD) sebesar 900.000 dalam 1 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 1.500.000 dalam 1 tahun, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 2.000.000 dalam 1 tahun. Pada komponen pendidikan, dengan adanya bantuan PKH yang ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu, dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga khususnya untuk keperluan-keperluan sekolah anak agar selanjutnya dapat mengubah nasib keluarga mereka agar menjadi lebih baik dan sejahtera dan juga dapat mengembangkan potensi, memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, kritis dalam berpikir. Bantuan pendidikan untuk KPM PKH ini dapat merubah pola pikir anak agar anak tersebut dapat mengubah nasib keluarga mereka, karena pendidikan ini juga dapat membantu untuk keterampilan dan perkembangan pada anak. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen pendidikan diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dari adanya program PKH tersebut



yaitu dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah anak khususnya untuk keluarga tidak mampu atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) khususnya pada tingkat SD, SMP, dan SMA.

7. Persepsi dari Guru SD Mengenai Anak KPM PKH yang Putus Sekolah di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam

Keterangan dari pihak sekolah mengenai anak dari KPM PKH yang putus sekolah:

“Jadi selama sekolah dilaksanakan secara online, yang mana pembelajaran semuanya ini serentak diadakan secara online jadi tidak bisa belajar langsung ke sekolah. Selama online ini juga anak-anak disuruh mengerjakan tugas-tugas, tetapi anak-anak penerima program bantuan PKH ini tidak sekolah tugas-tugas juga tidak dikerjakan alhasil nilainya kosong. Pihak sekolah juga sudah menyuruh agar orangtua anak tersebut datang kesekolah. Menurut keterangan beliau anaknya tidak bisa mengikuti kelas online karena tidak punya Handphone (HP), tidak bisa juga membeli HP untuk sekolah online, belum lagi nanti itu harus beli kuota jadi selama sekolah online ini Rasya dan juga Adrian itu bekerja. Saya selaku wali kelas Rasya sangat menyayangkan sekali anak seusia Rasya yang mana anak di umur segitu harus sekolah tapi malah disuruh bekerja” (Bapak Husain, S.Pd. Wawancara pada tanggal 17 Mei 2022)

Pentingnya pendidikan untuk masa depan anak, untuk menambah wawasan, mengasah kemampuan, dan juga untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Berdasarkan keterangan yang sudah dijelaskan diatas, yang mana anak dari KPM PKH ini putus sekolah dan selama anak tersebut tidak sekolah anak yang masih sekolah SD tersebut disuruh bekerja oleh ibu nya untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Kurangnya pemahaman dan perhatian khusus dari orangtua anak tersebut terhadap pentingnya pendidikan ini sangat disayangkan sekali karena tidak hanya di sekolah saja mereka mendapatkan pendidikan, tetapi dirumah dari orangtua mereka bisa memperhatikan dan



mengajarkan anak-anak mengenai pendidikan. Pihak sekolah juga sangat menyayangkan kejadian seperti ini dimana anak usia SD ini disuruh bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, yang mana seharusnya anak seusia tersebut itu seharusnya belajar, tapi malah disuruh bekerja. Itulah alasan kenapa pendidikan pada anak usia dini sangat penting.

D. PERAN DAN UPAYA PENDAMPING PKH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN YANG TERJADI PADA ANAK PUTUS SEKOLAH DI DESA GEDAMBAAN, KECAMATAAN PULAU LAUT SIGAM

Peran pendamping PKH sebagai fasilitator guna memberikan dorongan ataupun motivasi terhadap keluarga miskin yang mana sudah terdaftar di DTKS. Pendamping juga setiap bulan nya melakukan monitoring kesekolah-sekolah, dengan tujuan memperhatikan kegiatan dan kehadiran anak KPM PKH disekolah. Di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam ini terdapat anak dari KPM PKH yang putus sekolah. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan bagi pendamping yang harus diselesaikan. Upaya yang dilakukan pendamping PKH dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak putus sekolah di Desa Gedambaan adalah dengan melakukan home visit dan juga mediasi yang mana kegiatan tersebut pendamping memberikan pengarahan serta edukasi kepada orangtua dan anak mengenai pentingnya pendidikan pada anak.

1. Pendamping PKH

Strategi pembangunan sosial yang dianut dan berbagai komponen seperti sarana dan prasarana (fasilitas) yang diterima pendamping dan sumber daya manusia (latar belakang pendidikan, pengalaman dan komitmen) sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pendampingan di lapangan. Pelaksanaan pendampingan pada PKH, kedudukan pendamping PKH sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat maka pendamping PKH dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan baik kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat (Habibullah, 2011).



Pendamping sosial PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut, di kontrak kerjakan, dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat Kecamatan. Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi, dan motivasi bagi KPM PKH. Pelaksanaan proses pendampingan tidak hanya berfokus pada pendampingan perorangan KPM PKH yang terkendala atau membutuhkan terhadap akses layanan, tetapi juga melalui pendampingan terhadap kelompok. Pendampingan terhadap kelompok KPM PKH dapat dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Kemampuan Keluarga (P2K2).

2. Peran Pendamping PKH Kecamatan Pulau Laut Sigam

Keterangan dari pendamping PKH Kecamatan Pulau Laut Sigam:

“Jadi saya selaku pendamping PKH, ini untuk peran pendamping PKH itu sendiri sebagai fasilitator yang mana saya ini memberikan informasi, penjelasan, pendampingan untuk KPM PKH yang ada di Desa Gedambaan ini. Saya juga memberikan motivasi kepada KPM PKH melalui kegiatan P2K2 yang setiap bulan saya lakukan, P2K2 ini seperti sekolah tetapi ini adalah sekolah PKH yang mana dalam kegiatan P2K2 ini para KPM PKH diberikan beberapa materi. Biasanya materi saya ini berkaitan tentang pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sama modul pengasuhan dan pendidikan pada anak”.
(Wawancara pada tanggal 23 Mei 2022)

Peran pendamping PKH bahwasannya pendamping PKH melakukan pertemuan kelompok setiap sebulan sekali secara rutin dengan KPM–KPM PKH yang ada di Desa Gedambaan yang dapat memberikan manfaat baik untuk KPM PKH



karena dapat mengingat dan memberikan motivasi serta perubahan perilaku KPM PKH. Melalui pertemuan kelompok dan materi yang disampaikan pendamping tentang pelatihan pengelolaan keuangan dapat membantu mengatur pendapatan dan pengeluaran KPM dari dana bantuan yang didapatkan dengan baik dan benar. Untuk modul pengasuhan dan pendidikan anak pendamping PKH memberikan motivasi kepada KPM PKH mengenai pentingnya pendidikan kepada anak KPM bahwa dengan adanya pendidikan anak KPM ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu perekonomian keluarga.

3. Peran Pendamping PKH di Desa Gedambaan dalam Mengatasi Permasalahan pada Anak KPM PKH yang Putus Sekolah

Peran pendamping PKH dalam mengatasi permasalahan pada anak KPM PKH yang putus sekolah di Desa Gedambaan, dijelaskan oleh pendamping PKH Kecamatan Pulau Laut Sigam:

“Saya melakukan home visit ke rumah KPM PKH tersebut yang anaknya putus sekolah, saya juga memberikan motivasi kepada KPM PKH dan anak tersebut. Dan juga saya memberikan gambaran mengenai masa depan yang lebih baik jika pendidikan kita tinggi. Serta saya juga menawarkan dan memberi kesempatan kepada anak KPM PKH tersebut supaya bisa melanjutkan kembali sekolah”. (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2022)

Adanya program PKH dalam bidang pendidikan ini dapat membantu anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk sekolah. Tujuan PKH dalam bidang pendidikan ini adalah memberikan bantuan uang tunai secara langsung kepada KPM PKH untuk dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam hal membeli kebutuhan dan perlengkapan sekolah anak sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam menyekolahkan anaknya karena adanya bantuan PKH dalam komponen pendidikan tersebut. Di sisi lain terdapat hambatan yang dialami oleh



pendamping PKH yang ada di Kecamatan Pulau Laut Sigam tepatnya di Desa Gedambaan, yaitu: 1). Anak dari KPM PKH putus sekolah; 2). Dana bantuan PKH dalam bidang pendidikan yang mana pada saat anak tersebut putus sekolah, dana bantuan yang tetap cair disalahgunakan oleh KPM tersebut untuk keperluan sehari-hari keluarga. Oleh karena itu hal tersebut menjadi permasalahan bagi pendamping PKH, apabila dari home visit yang dilakukan pendamping PKH terhadap KPM PKH tersebut berhasil membuat anak dari KPM PKH itu ingin melanjutkan sekolahnya berarti mediasi yang dilakukan pendamping ini berhasil, apabila dari home visit tersebut anak KPM PKH tidak juga melanjutkan sekolah otomatis bantuan pendidikan PKH dicabut oleh pemerintah. Pendamping PKH memberikan kesadaran dan pemahaman kepada KPM PKH dan anak yang putus sekolah tersebut mengenai pentingnya pendidikan, yang mana anak tersebut termotivasi dan memiliki keinginan yang tinggi untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan baik.

4. Bentuk Pelayanan Pendidikan dari Pendamping PKH kepada KPM

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bentuk pelayanan PKH ini melalui pertemuan kelompok yaitu P2K2. Yang mana pada masing-masing komponen PKH bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, pendamping PKH melakukan kegiatan pertemuan kelompok yang dilakukan rutin sebulan sekali pada kegiatan pertemuan kelompok yaitu P2K2 yang mana merupakan kepanjangan dari Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku kepada KPM PKH. Dalam modul kegiatan P2K2 terdapat 5 modul utama P2K2 yaitu: 1). Modul Kesehatan dan Gizi; 2). Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak; 3). Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga; 4). Modul Perlindungan Anak; dan 5). Modul Kesejahteraan Sosial.

5. Upaya Pendamping PKH Mengatasi Permasalahan Anak dari KPM PKH yang Putus Sekolah di Desa Gedambaan



Upaya pendamping PKH dalam mengatasi permasalahan yang mana anak dari KPM PKH di Desa Gedambaan ini putus sekolah. Keterangan dari Ibu Maya Krida Astuti selaku pendamping PKH Kecamatan Pulau Laut Sigam:

“Menawarkan kepada anak KPM tersebut supaya mau melanjutkan kembali sekolahnya. Apabila dari penawaran saya terhadap anak KPM tersebut tidak berhasil, saya melakukan home visit semacam mediasi kepada orangtua dan anak tersebut mediasi yang saya lakukan ini seperti memberikan gambaran masa depan dan motivasi kepada orangtua dan anak tersebut, apabila dari home visit antara orangtua dan anak ini juga tidak berhasil, selanjutnya upaya terakhir yang saya lakukan adalah dengan melakukan mediasi yang melibatkan pihak sekolah bisa wali kelas bahkan kepala sekolah juga terlibat”. (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2022)

Dalam program PKH ini tidak terlepas dari adanya permasalahan yang terjadi baik itu tidak tepat sasaran, maupun penyalahgunaan KPM PKH terhadap dana bantuan. Dalam permasalahan yang terjadi pada penelitian ini yang mana KPM PKH dalam bidang pendidikan ini menyalahgunakan dana bantuan tersebut, dan karena dampak pandemi Covid-19 ini yang mana pembelajaran dilakukan secara online hal tersebut menjadi awal mula permasalahan pada anak dari KPM PKH tersebut. Jadi, terdapat anak dari KPM PKH di Desa Gedambaan ini yang terdaftar dalam peserta PKH pada komponen pendidikan, anak tersebut putus sekolah. Ini menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh pendamping PKH agar dana pendidikan pada anak tidak disalahgunakan, oleh karena itu pendamping PKH berupaya mengatasi permasalahan ini dengan cara, yaitu: 1). Melakukan home visit kerumah KPM PKH yang bermasalah; 2). Memberikan motivasi serta memberikan kesempatan pada anak agar mau melanjutkan sekolah kembali.



E. SIMPULAN

Pelaksanaan PKH di Desa Gedambaan sudah berjalan dengan baik, program ini sangat membantu perekonomian bagi KPM PKH. Tetapi sangat disayangkan masih ada KPM PKH yang menyalahgunakan dana bantuan, khususnya pada bidang pendidikan, yakni menggunakan dana bantuan pendidikan untuk membeli keperluan dan kebutuhan untuk keluarga, tidak digunakan untuk perlengkapan dan keperluan sekolah anak. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari KPM akan pentingnya pendidikan anak, yang menyebabkan KPM tersebut menyalahgunakan dana bantuan.

Dalam hal tersebut pendamping PKH melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak KPM PKH yang putus sekolah. Peran pendamping PKH di Desa Gedambaan ini sangat baik dan KPM sangat terbantu dengan adanya program PKH. Pendamping PKH di Desa Gedambaan setiap bulan melakukan pertemuan kelompok yang ditujukan kepada KPM atau yang lebih dikenal dengan P2K2. Dalam kegiatan P2K2, pendamping PKH memberikan pemahaman dan edukasi kepada KPM, dari pertemuan kelompok tersebut pendamping memberikan materi mengenai pelatihan pengelolaan keuangan yang mana dapat mengatur pendapatan dan pengeluaran KPM dari dana bantuan yang didapatkan dengan baik dan benar, serta pendamping juga memberikan motivasi kepada KPM PKH mengenai pentingnya pendidikan anak dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak. Upaya pendamping PKH dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Desa Gedambaan yaitu ada anak KPM PKH putus sekolah, upaya yang dilakukan pendamping adalah home visit dan mediasi yang mana pendamping memberikan pemahaman kepada orangtua mengenai pentingnya pendidikan pada anak. Home visit dan mediasi yang dilakukan bertujuan agar anak KPM PKH tersebut mau melanjutkan kembali sekolah supaya dana bantuan pendidikan PKH tidak dicabut oleh pemerintah dan anak dari KPM PKH tersebut melanjutkan pendidikan nya



sampai kejenjang yang lebih tinggi supaya dapat merubah kehidupan keluarga mereka apabila pendidikan anak tersebut tinggi.

REFERENSI

- Djabar, D. A., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingabila Kabupaten Bonebolango. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 581–588.
- Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1–9.
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021). Analisis pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39–53.
- Khomsan, Ali, dkk. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kustanto, M. (2019). Konstruksi Sosial Tentang Pendidikan Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Sidoarjo. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 8(3), 267–286.
- Norliani, N., Jamaludin, J., & Hayati, R. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA BIDANG PENDIDIKAN DI DESA BONGKANG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 3(2), 449–459.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang–Undang Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.



- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88–92.
- Tlonaen, Y. B., Hardiyanto, W. T., & Diahloka, C. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1).